

SKRIPSI

POLITIK KEKERABATAN YASIN LIMPO DI SULAWESI SELATAN

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANUGRAH MARSELINDAH

E041181508



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

POLITIK KEKERABATAN

YASIN LIMPO DI SULAWESI SELATAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANUGRAH MARSELINDAH

E041181508

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
POLITIK KEKERABATAN YASIN LIMPO DI SULAWESI SELATAN

Disusun dan Diajukan Oleh :


ANUGRAH MARSELINDAH

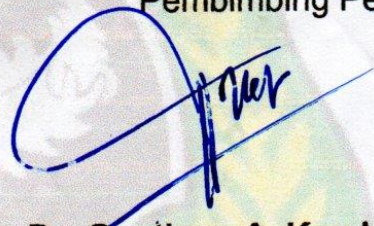
E041181508

Menyetujui,

Pembimbing Utama

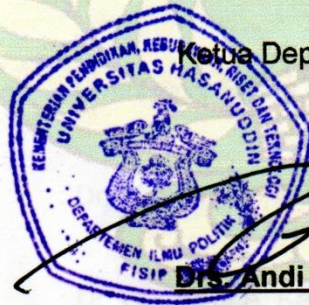
Pembimbing Pendamping

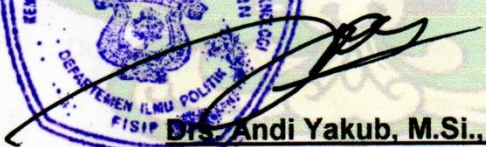

Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023


Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.
NIP. 19730813 199802 2 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik




Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

NIP. 19621231 199003 1 023

**HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI**

POLITIK KEKERABATAN YASIN LIMPO DI SULAWESI SELATAN

Disusun dan Diajukan Oleh :

ANUGRAH MARSELINDAH

E041181508

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

Pada Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

Panitia Ujian

Ketua : Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.

Anggota : Dr. Muh. Imran, S.IP, M.Si

Anggota : Ummi Suci Fathia B., S.IP., M.IP

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANUGRAH MARSELINDAH

NIM : E041181508

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Politik Kekerabatan Yasin Limpo di Sulawesi Selatan" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Januari 2023



(ANUGRAH MARSELINDAH)

ABSTRAK

Anugrah Marselindah E041181508. Politik Kekerabatan Yasin Limpo Di Sulawesi Selatan. Dibawah bimbingan Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. sebagai Pembimbing.

Politik kekerabatan Yasin Limpo terus mewarnai dunia politik, khususnya di tingkat provinsi Sulawesi Selatan, beberapa dari keluarga Yasin Limpo sejauh ini masih menduduki jabatan struktural di pemerintahan maupun jabatan diluar pemerintahan, diantaranya untuk yang di dalam pemerintahan adalah Adnan Purichta yang menjabat sebagai Bupati Gowa periode 2021-2024, Devo Khaddafi yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Sulsel, dan Kemal Redindo Syahrul Putra menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel. Kemudian untuk yang diluar pemerintahan ada Andi Pahlevi sebagai anggota DPRD Makassar. Salah satu daerah yang menjadi arena kontestasi elektoral dan basis massa dari keluarga Yasin Limpo di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Gowa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana keluarga Yasin Limpo dalam mempertahankan politik kekerabatannya di Sulawesi Selatan, serta bagaimana pola jaringan politik yang di bangun oleh keluarga Yasin Limpo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa informan yang di anggap dapat memberikan informasi yang tepat dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bertahannya eksistensi politik kekerabatan Yasin Limpo di Sulawesi Selatan di dasari oleh adanya kultur keluarga yang berangkat dari sebuah ideologi, konsistensi mereka dalam menjaga kepercayaan masyarakat, dan dukungan dari sesama anggota keluarga Yasin Limpo yang menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif. Bertahannya Eksistensi politik kekerabatan Yasin Limpo juga semakin diperkuat dengan adanya pola jaringan politik yang terbentuk melalui, Jaringan Partai Politik, Jaringan Birokrasi dan BUMN/BUMD, Jaringan Sosial, dan Jaringan Organisasi Masyarakat.

Kata Kunci : Politik Kekerabatan, Mempertahankan Eksistensi, Pola Jaringan Politik.

ABSTRACT

Anugrah Marselindah E041181508. Yasin Limpo's Kinship Politics in South Sulawesi. Under the Guidance of Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. and Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

Yasin Limpo's kinship politics continues to color the world of politics, especially at the provincial level of South Sulawesi. Some of the Yasin Limpo family so far still hold structural positions in the government as well as positions outside the government, including those in government, Adnan Purichta who serves as Regent of Gowa for the 2021 period. - 2024, Devo Khaddafi who serves as Secretary of the Tourism and Culture Office of the South Sulawesi Provincial Government, and Kemal Redindo Syahrul Putra serves as Plt. Head of the South Sulawesi Provincial Government's Food Security Service. Then for those outside the government there is Andi Pahlevi as a member of the Makassar DPRD. One of the areas that has become the arena of electoral contestation and the mass base of the Yasin Limpo family in South Sulawesi is Gowa Regency.

This study aims to find out and explain how the Yasin Limpo family maintains its kinship politics in South Sulawesi, as well as the pattern of political networks built by the Yasin Limpo family. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. Data collection was carried out by interviewing several informants who were considered able to provide the right information using two kinds of data, namely primary data and secondary data.

The results of this study indicate that the persistence of the existence of Yasin Limpo's kinship politics in South Sulawesi is based on the existence of a family culture that departs from an ideology, their consistency in maintaining public trust, and support from fellow Yasin Limpo family members who occupy positions in the executive and legislative branches. The persistence of Yasin Limpo's kinship political existence is also further strengthened by the pattern of political networks that are formed through the Political Party Network, Bureaucratic Network and BUMN/BUMD Network, Social Network, and Community Organization Network.

Keywords: Kinship Politics, Maintaining Existence, Pattern Political Network.

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua Lewi Mengkola, SE dan Dra Yuliana Baralangi yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin.

Penulis juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, dan Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si** yang telah banyak memberikan arahan, meluangkan waktu dan pikiran terhadap penulis dalam menyusun skripsi hingga ujian akhir.

Selain itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. **Ibu Prof. Dwi Aries Tina Palubuhu, MA** selaku rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 yang telah memberikan perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin dan bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-sekarang.
2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si.**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah memberi ruang pada penulis di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Ibu **Dr. Hasniati, S.Sos.**, Bapak **Dr Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.**, dan **Bapak Prof, Dr Suparman, M.Si** selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan akademik dan kemahasiswaan.
4. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah menjadi orang tua penulis di kampus selama perkuliahan dan membantu kelancaran administrasi akademik.
5. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Muhammad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag** (Alm), Bapak **Drs. A. Yakub, M.Si**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, MA**, Bapak **Andi**

Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak **Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si**, Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si**, Ibu **Dr. Ariana Yunus S.IP, M.Si**, Bapak **Dr. Imran, S.IP, M.Si**, Ibu **Sakinah Nadir, S.IP, M.Si**, Ibu **Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si**, Bapak **Zulhajar, S.IP, M.Si**, dan Ibu **Dian Ekawati, S.IP, M.Si** yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu, arahan dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Informan penulis **Abbas Alauddin, Irman Yasin Limpo, Haris Yasin Limpo, Adnan Purichta, Andi Pahlevi, Devo Khaddafi, Dr. Jayadi Nas, S.Sos., M.Si, Dr. Tasrifin Tahara, M.Si, Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si, Andi Hikmawati**, dan **Andi Didis Abdi Abu Baeda** yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melangsungkan penelitian dan memperoleh data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang penulis butuhkan.
8. Keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah mewadahi penulis di kampus dan memberikan pembelajaran besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah.
9. Seluruh teman **Ilmu Politik angkatan 2018** yang telah bersama dari mahasiswa baru hingga sekarang.

10. Saudara seperjuangan **Revolusi 2018** yang selalu ada dalam suka maupun duka.
11. Teman- teman **KKN 106 Kecamatan Panakukang** yang telah menghibur penulis di kala bersedih memikirkan skripsi
12. Sahabat Kampus **Linda Amaliah Sari, S. IP, Rahmatang, S.IP, Rahmayanti, S. IP** dan **Nis Yumnalaili Syarif** yang telah menjadi keluarga, sahabat, sodara, senasib dan seperjuangan yang telah sama- sama memberikan beban dan juga saling meringankan beban.
13. Kepada **Kak Yudha** yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk direpotkan oleh penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
14. Pihak-pihak lain yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan YME memberikan balasan yang berlipat atas amalan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 16 Januari 2023

ANUGRAH MARSELINDAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	19
1.3. Tujuan Penelitian	19
1.4. Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. Politik Kekkerabatan	22
2.2. Faktor-faktor terbentuknya politik kekerabatan	24
2.3. Teori Kekkerabatan	27
2.4. Teori Kekuatan Politik	31
2.3. Penelitian Terdahulu	35
2.4. Kerangka Berpikir	38
2.5. Skema Pikir	41

BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Lokasi Penelitian	42
3.2. Tipe Penelitian	43
3.3. Sumber Data	43
3.4. Teknik Pengumpulan Data	45
3.5. Analisis Data Penelitian	48
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	50
4.1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan	50
4.2. Profil Muhammad Yasin Limpo.....	52
4.3. Politik Kekkerabatan Yasin Limpo di Sulawesi Selatan.....	55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
5.1. Keluarga Yasin Limpo Dalam Mempertahankan Politik Kekkerabatan di Sulawesi Selatan	62
5.1.1. Menumbuhkan Minat Politik Sejak Dini di Kalangan Keluarga Yasin Limpo	64
5.1.2. Menjaga Kepercayaan Masyarakat	68
5.1.3. Menduduki Jabatan di Eksekutif dan Legislatif.....	79
5.2. Pola Jaringan Politik Yang di Bangun Oleh Keluarga Yasin Limpo	91
5.2.1. Menjalin Relasi yang Baik dengan Masyarakat	92
5.2.2. Bergabung dengan Partai Politik	97
5.2.3. Terlibat dalam Birokrasi dan BUMN/ BUMD.....	103

5.2.4. Menjalin Relasi dengan Organisasi Masyarakat.....	106
BAB VI PENUTUP	121
6.1. Kesimpulan	121
6.2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN.....	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Sulawesi Selatan

Gambar 5.1 Penurunan Angka Kemiskinan di Prov. Sulawesi Selatan

Gambar 5.1.1. Dinasti Politik Yasin Limpo di Kab. Gowa SulSel

DAFTAR TABEL

Tabel 4.3. Riwayat Politik Keekerabatan Yasin Limpi

Tabel 4.3.1. Partai Politik Keluarga Yasin Limpo

Tabel 5.2.2. Jabatan dari masing- masing anggota Yasin Limpo di
Partainya

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1 Anak Yasin Limpo (Irman Yasin Limpo)

Dokumentasi 2 Anak Yasin Limpo (Haris Yasin Limpo)

Dokumentasi 3 Cucu Yasin Limpo (Adnan Purichta Yasin Limpo)

Dokumentasi 4 Cucu Yasin Limpo (Devo Khadaffi)

Dokumentasi 5 Cucu Yasin Limpo (A. Pahlevi)

Dokumentasi 6 Wakil Ketua Pemenangan Adnan (Abbas Alauddin)

Dokumentasi 7 Istri Raja Gowa (Andi Hikmawati)

Dokumentasi 8 Juru Bicara Lembaga Kerajaan Gowa (Andi Didis)

Dokumentasi 9 Pengamat Politik (Andi Luhur Prianto)

Dokumentasi 10 Dosen Antropologi Fisip Unhas (Dr. Tasrifin Tahara)

Dokumentasi 11 Dosen Pemerintahan Fisip Unhas (Dr Jayadi Nas)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politik kekerabatan populer setelah beberapa tahun terakhir. Politik kekerabatan hadir seiring dengan liberalisasi politik dan praktek politik desentralisasi. Politik kekerabatan merupakan konsep lama dalam kajian ilmu politik. Secara sederhana Politik kekerabatan dimaknai mirip dengan dengan perilaku nepotisme. Mengapa demikian? Karena politik kekerabatan melakukan praktik pendistribusian kekuasaan diantara para anggota keluarga sedarah. Makna ini mengilustrasikan bahwa dalam politik kekerabatan kekuasaan didistribusikan diantara anggota keluarga. Anggota keluarga bisa istri, anak, adik, dan ipar. ¹

Agustino Leo mengartikan politik kekerabatan sebagai upaya penguasa meletakkan keluarga, dan kerabat pada jabatan-jabatan strategis dengan tujuan membangun sebuah dinasti politik di dalam pemerintahan, baik nasional maupun di tingkat lokal. Upaya itu dilakukan agar mereka yang menjadi anggota politik kekerabatan dapat saling menjaga dan kekal dalam kekuasaannya, disamping mampu mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginan keluarga tersebut. Poin penting dari analisis di atas adalah politik kekerabatan beroperasi dalam lingkup institusi politik dan pemerintahan dengan cara memasukkan

¹ Masda, Putri Amelia yang berjudul „Membangun Dinasti Politik Melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan Pda Walikota Probolinggo“. Jurnal Politik Muda, Vol.4, No.3 Agustus-Desember 2015. Hal. 7

anggota keluarga dan sanak saudara. Keluarga dan sanak saudara yang menjabat kuasa dalam politik diharapkan saling menjaga agar bisa bertahan lama dalam kekuasaannya. Saling mendudukan keluarga atau saudara dalam jabatan strategis akan memudahkan penguasa mengontrol dan mengendalikan semua hal yang diperlukan penguasa.²

Keluarga sudah lama menjadi perhatian dalam kajian ilmu politik. Karya klasik Mohtar Mas'ued dan Collin MacAndrews "Perbandingan Sistem Politik" menyebutkan bahwa betapa kuatnya pengaruh keluarga dalam pembentukan politik seseorang. Dalam pandangan kedua orang penulis tersebut bahwa keluarga memiliki pengaruh kuat dan kekal dalam struktur sosialisasi politik. Keluargalah yang membentuk sikap politik seseorang, memberikan kecakapan dalam interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dalam politik.³

Poin penting dari kutipan di atas adalah menempatkan keluarga sebagai poros sentral dalam sosialisasi politik, pembentukan sikap politik, menambah kecakapan politik serta bisa mendorong anggota keluarganya dalam berpartisipasi dalam politik. Kalau demikian argumennya, maka keluarga merupakan institusi pembentukan pendidikan politik dan pembentukan karakter serta sikap politik. keluarga merupakan pembentukan politik pertama sebelum berkiprah di dunia luar. keluarga memiliki andil yang cukup besar dalam pembentukan politik seseorang.

² Djati, Wasisto Raharjo. "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Arus Lokal" *The Journal of Political*, Vol. 39 No 2, Maret 2020. Hal. 40

³ Keller, Suzanne. *Penguasa dan kelompok Elit Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: CV. Rajawali. 2009. Hal. 23

Keluarga adalah dapur politik dalam penggodokan kader politik selanjutnya yang diharapkan dapat melanjutkan karir politik keluarga dalam pentas politik.

Politik kekerabatan hampir mirip dengan politik dinasti dalam arti politik tradisional. Politik dinasti adalah istilah yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan siklus kekuasaan yang hanya melanjutkan kekuasaan sebelumnya, dan politik lokal menjadi ranah dari banyak studi yang telah ada. Fenomena munculnya sentimen kekeluargaan dalam politik lokal di Indonesia dipahami sebagai hasil kombinasi politik sentripugal (sentralisasi) pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto dan tekanan politik sentripetal (desentralisasi) pasca Soeharto.⁴

Munculnya fenomena keluarga politik ditandai dengan keikutsertaan suami, istri, anak dan kerabat lainnya dari petahana dalam kancah politik, baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, atau penempatan jabatan-jabatan penting lainnya. Semakin menguatnya keluarga politik yang mengindikasikan gejala apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai neopatrimornialistik, yaitu raja-raja kecil di daerah semakin memperluas kekuasaan politiknya melalui jaringan kekerabatan. Kemunculan elit lokal ini menurut Sidel diakibatkan karena sistem pemilihan yang bergeser ke sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.⁵

⁴ Ibid. Hal. 26

⁵ Firmanzah. 2017. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 59-60

Fenomena keluarga politik dapat dianalisis ke dalam tiga hal. Pertama, buruknya proses kaderisasi partai politik dalam merekrut calon kepala daerah yang berkualitas untuk menduduki jabatan publik. Kedua, kondisi *statusquo* dalam masyarakat yang menginginkan daerahnya dijabat kembali oleh keluarga petahana. Ketiga, Fenomena keluarga politik juga disebabkan karena keinginan kuat dari petahana untuk mempertahankan kekuasaannya dengan membentuk keluarga politik. Politik dengan ikatan kekeluargaan begitu banyak dipraktikkan di beberapa daerah, data ini dapat dilihat pada tahun 2013, sebanyak 61 kepala daerah atau sekitar 11% dari semua kepala daerah yang mempunyai ikatan kekeluargaan.⁶

Keluarga politik ini tersebar di 15 (lima belas) provinsi diantaranya adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Lampung, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku dan hampir semua provinsi yang ada di pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur) (Kompas.com, 18 Oktober 2013). Diantara kepala daerah di Indonesia yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat lainnya adalah keluarga politik Yasin Limpo di Sulawesi Selatan.⁷

Akar penting dari keluarga Yasin Limpo tentu saja Kolonel Muhammad Yasin Limpo. Pada tahun-tahun awal Revolusi Indonesia,

⁶ Gaus, F Gerald dan Chandran Kukathas, "*Teori Politik, Bandung*" : Nusa Media, 2013. Hal. 48

⁷ www.kompas.com "Kolonel Inf. (Purn.) H. Muhammad Yasin Limpo" di akses 18 Oktober 2022

Muhammad Yasin Limpo seperti banyak pemuda di zamannya, satu kubu dengan Wolter Mongisidi. Sejak masa revolusi kemerdekaan, Muhammad Yasin Limpo aktif berjuang membela bangsa dan tanah air ini dari penjajahan. Perjuangannya di bawah naungan PARRIS (Pejuang Rahasia Rakyat Indonesia Sulawesi). Ia juga bergabung dengan pimpinan pasukan LAPRIS di Polongbangkeng Takalar, Syarifuddin Daeng Kulle dan kawan-kawan dalam buku *Rakyat Gowa Menentang Penjajah* (2007: 86). Sebagai pejuang kemerdekaan, Muhammad Yasin Limpo tentulah bagian dari Angkatan 45 yang dihormati itu.

Di Indonesia, menyandang sebutan Angkatan 45 adalah reputasi yang sangat mulia. Meski yang bersangkutan tak bisa menikmati, reputasi sebagai Angkatan 45 mampu meningkatkan modal politik berupa pencitraan yang tidak hanya bagus, tapi juga heroik. Usai Revolusi, laki-laki kelahiran Bontonompo, Gowa, 17 Juni 1924 ini bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut catatan *Barbara Sillars Harvey* dalam buku *Pemberontakan Kahar Muzakkar: dari Tradisi ke DI/ TII* (1989: 357), selama kurun waktu Juni 1957 hingga Januari 1958, Kapten Muhammad Yasin Limpo adalah komandan Batalyon L (Batalyon 008/Lapris), sebagai bagian dari Resimen Infanteri 23 pimpinan Mayor Andi Rifai. Ketika jadi perwira TNI, Yasin Limpo menikahi Nurhayati, perempuan kelahiran Pare-pare yang cukup terpelajar di zamannya.

Dari perkawinan itu kemudian lahirlah Tenri Olle Yasin Limpo, Syahrul Yasin Limpo, Tenri Angka Yasin Limpo, Dewi Yasin Limpo, Ichsan

Yasin Limpo, Haris Yasin Limpo, dan Irman Yasin Limpo. Pada awal 1960-an, menurut catatan buku *Almanak Lembaga-Lembaga Negara Dan Kepartaian* (1962: 418), Yasin Limpo mewakili ABRI dalam *Front Nasional* daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Selain jabatan militer di Sulawesi Selatan, Yasin Limpo pernah jadi pemangku jabatan sipil di daerah Maros, Gowa, dan Majene.

Soal jabatan sipil, menurut catatan Muhammad Arfah dalam bukunya *Pajonga Daeng Ngalle: Karaeng Polombangkeng: Biografi Pahlawan* (1988: 55), tanggal 5-5-1950 dengan melalui rapat PPKRI di Palteko, M. Yasin Limpo diangkat sebagai K.P.N. (Kepala Pemerintahan Negeri) Takalar. Takalar merupakan kabupaten yang persis berbatasan langsung dengan Gowa. "YL (Yasin Limpo) yang berlatar tentara dan birokrat merupakan salah satu pendiri Sekretariat Bersama (Sekber). Karena YL yang mendirikan Sekber Golkar secara otomatis berkontribusi baik pemikiran, tenaga dan material dalam rangka membangun dan membesarkan Golkar," tulis Muhtar Haboddin dalam buku *Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia* (2015: 168). Orientasi dan afiliasi politik keluarga Yasin Limpo (YL) terpusat di partai Golkar dan kebesaran Limpo di Golkar Sulawesi Selatan tentu bermanfaat bagi anak-anaknya.

Istri Muhammad Yasin Limpo, Nurhayati, belakangan dua kali jadi anggota DPR (1999-2004 dan 2004-2009). Kader organisasi Aisyiyah Muhammadiyah itu pernah menjabat anggota DPRD Sulsel dari unsur

Golkar periode 1987-1992, 1992-1997, dan 1997-1999. Selanjutnya periode 1999-2004, menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. “Dari 24 jumlah perempuan yang duduk dalam DPRD Tk. I Sulsel pada masa pemerintahan Orde Baru, hanya terdiri dari 2 orang atau 8 persen yang melakukan mobilisasi; yaitu Aisyah Radjeng Pananrang dan Nurhayati Yasin Limpo,” tulis Siti Maryam dalam bukunya *Politik & Postkolonialitas di Indonesia* (2003: 199).⁸

Anak-anak Yasin Limpo akhirnya terjun juga ke dunia politik. Partai mereka tak melulu Golkar. Setidaknya di antara anak-anaknya ada yang pernah duduk di kursi parlemen. Mendiang Ichsan Yasin Limpo pernah jadi anggota DPR dari 1999 hingga 2005, sebelum akhirnya jadi Bupati Gowa. Tenri Olle, yang kini gagal, dulunya pernah menjabat Ketua DPRD Gowa periode 2009-2014 dan kemudian anggota DPRD Sulsel periode 2014-2019. Sedangkan Tenri Angka adalah anggota DPRD Makassar. Haris Yasin Limpo, yang jadi Direktur PDAM Makassar, pernah duduk di kursi anggota DPRD Makassar periode 2009-2014. Cucu Yasin Limpo, putri Syahrul, Indira Chunda Thita Syahrul Putri, yang kini gagal jadi anggota DPR, juga pernah jadi anggota dewan. Anak Tenri Olle, Akbar Danu Indarta Marwan, juga pernah menjadi anggota DPRD Gowa.

Di luar parlemen, Syahrul yang kerap disapa komandan, pernah jadi gubernur. Adiknya, Irman Yasin Limpo, adalah Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Luwu. Dan tentu saja Adnan Purichta Ichsan sebagai Bupati Gowa.

⁸ <https://tirto.id/> “Sejarah Kejayaan Keluarga Yasin Limpo” diakses 15 April 2022.

Tak hanya di Sulawesi Selatan, tebaran jaring keluarga Yasin Limpo juga sampai ke Palu. Menantu Muhammad Yasin Limpo, Habsa Yanti Ponulele, isteri Irman Yasin Limpo, pernah mencoba peruntungan dalam Pilkada Kota Palu pada Desember, namun kalah oleh pasangan Hidayat-Sigit Purnomo alias Pasha Ungu.⁹

Dalam kancah politik, keluarga Yasin Limpo dikenal sebagai petarung. Syahrul Yasin Limpo misalnya, sebelum menjadi gubernur periode 2009-2014 dia adalah Wakil Gubernur Sulsel periode 2003-2008 mendampingi Mayjen (Purn) HM Amin Syam. Namun, pada pemilihan gubernur periode 2009-2014, Syahrul meninggalkan HM Amin Syam dan berpasangan dengan Agus Arifin Nu'mang, Syahrul mampu mengalahkan kekuatan politik gubernur *incumbent* HM Amin Syam yang berpasangan dengan Prof. Masyur Ramli serta pasangan Azis Qahhar Mudzakkar-Mubyl Handaling. Pada pilgub periode 2014-2018, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang kembali unggul, menggeser dua rival pasangan calon gubernur lainnya yaitu, Andi Rudianto Asapa-Andi Nawir Pasinringi, dan Ilham Arief Siradjuddin - Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar.

Demikian pula adiknya, mendiang Ichsan Yasin Limpo, pada pemilihan Bupati Gowa periode 2005-2010, Ichsan yang berpasangan dengan Abd. Razak Badjidu mampu mengalahkan pasangan Andi Maddusila Idjo yang mengklaim diri sebagai pewaris tahta Kerajaan Gowa dan berpasangan Mayor (Purn) Mahyuddin serta pasangan calon Syahrir

⁹ www.liputan6.com "menang-pilkada-palu" diakses 25 November 2022

Syafruddin Daeng Jarung- Abdul Djabbar Hijaz, dan Hasbullah Djabbar- Abdul Hafid Latif. Pada Pilkada bupati periode 2010-2015, Ichsan Yasin Limpo kembali membuktikan diri sebagai petarung, menyisihkan pasangan Andi Maddusila dan kandidat lainnya. Setelah masa jabatan Ichsan Yasin Limpo berakhir Agustus 2015, pertarungan diwarisi putranya, Adnan Purichta Yasin Limpo yang maju berpasangan dengan Abdul Rauf Malaganni untuk bertarung pada pilkada bupati Gowa periode 2015-2020.

Pada saat Syahrul Yasin Limpo berhasil menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, Yasin Limpo akhirnya meninggal dunia di usia 85 tahun pada 2009 silam. Pejuang dengan pangkat terakhir kolonel itu dikenal sebagai perintis Partai Golkar di Makassar. Maka wajar jika semasa hidupnya pernah menjabat Bupati Gowa, Bupati Maros, serta dikenal sebagai guru politik Jusuf Kalla (JK). Dengan JK, Syahrul berstatus besan. Jadi Syahrul juga bagian dari keluarga besar JK, selain Aksa Mahmud. Yasin Limpo senior tak hanya jadi panutan keluarga besarnya yang kini dilanda tahun-tahun politik penuh mendung, tapi juga jadi bagian penting Sulawesi Selatan. Sejak 2015, namanya diabadikan sebagai nama jalan poros antara Samata di Romangpolong dan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Kehadiran sejumlah nama besar keluarga dalam panggung politik lokal semakin membuktikan keabsahan pepatah lama yang mengatakan bahwa darah lebih kental daripada air. Pepatah ini sangat relevan dalam memotret cara kerja politik kekerabatan dalam memburu dan mempertahankan kekuasaan melalui pilkada langsung. Sebagai ilustrasi

keluarga Yasin Limpo di Sulawesi Selatan sudah berhasil menancapkan kekuasaannya di Kabupaten Gowa. Dalam catatan penulis menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa sudah berhasil diperintah selama tiga generasi. Generasi pertama yang berhasil menjadi bupati adalah Yasin Limpo sebagai Bupati Maros, kemudian dilanjutkan dua anaknya secara berturut-turut yakni Syahrul Yasin Limpo sebagai Bupati Gowa dan Ichsan Yasin Limpo pun sebagai Bupati Gowa, kemudian oleh cucu Yasin Limpo yakni Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo yang saat ini masih menjadi Bupati Gowa. Meskipun Yasin Limpo pernah menjabat sebagai Bupati Maros, namun jika melihat keberhasilan generasi kedua dan ketiganya untuk menjadi kepala daerah, maka bisa disimpulkan bahwa pusat kekuatan politik yang dimiliki oleh keluarga Yasin Limpo berbasis di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Menjabatnya Syahrul Yasin Limpo sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan selama dua periode kemarin semakin mempengaruhi kekuatan politik yang telah dibangun oleh keluarga Yasin Limpo selama ini. Mengingat Syahrul Yasin Limpo sekaligus mendapatkan dukungan penuh dari salah satu partai politik yang memiliki nama besar yakni Partai Golkar, bahkan dulunya Syahrul Yasin Limpo adalah Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan, sebelum akhirnya berpindah ke Partai Nasdem. Bahkan saat ini Syahrul Yasin Limpo mendapatkan kepercayaan dari Partai Nasdem untuk menjadi Ketua DPP Nasdem periode 2018-2023. Hebatnya lagi Syahrul Yasin Limpo kini sudah semakin melebarkan sayap dengan menjabat

sebagai Menteri Pertanian di Kabinet Presiden Joko Widodo. Sehingga inilah salah satu faktor yang menjadi penyebab mengapa Politik Kekerabatan Yasin Limpo masih terus menunjukkan eksistensinya di Provinsi Sulawesi Selatan.¹⁰

Anak kandung dari Yasin Limpo banyak yang menjadi tokoh penting dalam pemerintahan, politik maupun non politik dan pemerintahan, Di balik keberhasilan mereka Hj Nurhayati Yasin Limpo disebut-sebut sebagai ibu yang sukses memainkan peran politik di legislatif sekaligus sukses mendorong dan mengantar putra-putrinya menjadi seorang yang berpengaruh di Sulawesi Selatan diantaranya:

1. Tenri Olle Yasin Limpo putri sulungnya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Gowa periode 2009-2014, anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar 2014-2019, Ketua DPD Partai Golkar Gowa dan pernah bertarung sebagai calon Bupati Gowa Gowa periode 2016-2021.
2. Syahrul Yasin Limpo, yang juga merupakan mantan Gubernur Sulawesi Selatan. memulai karier pemerintahan dari jabatan lurah, camat dan dua periode menjadi bupati di Gowa, menjadi Kabag Humas Pemprov Sulsel, dan terpilih sebagai wakil gubernur Sulsel mendampingi Amin Syam, periode 2003 - 2008. Gubernur Sulsel dua periode, 2008 - 2013 dan 2013 - 2018, Ketua DPD I Partai

¹⁰ <https://investor.id> "Klan Yasin Limpo di Kancah Kekuasaan" diakses 17 Mei 2022

Golongan Karya (Golkar) Sulsel periode 2009 - 2014 dan menjadi Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

3. Dewi Yasin Limpo, pernah menjabat sebagai anggota Komisi VII DPR RI periode 2014 -2019 dari Partai Hanura, Dewan Pertimbangan PPK Kosgoro Sulsel, Ketua DPP Wanita Kosgoro 2013, Bendahara Umum DPP Aspendo 2012, Ketua Perhimpunan Nelayan Tradisional Sulsel 2012, Ketua DPP Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia 2014, Pengurus DPP Partai Hanura.
4. Ichsan Yasin Limpo, yang pernah menjabat sebagai Bupati Gowa dua periode 2005-2010 dan 2010-2015, pengurus Partai Golkar Sulsel, mantan Ketua Umum FKPPi Sulsel dan pernah mengabdikan diri di bidang sosial sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sulsel.
5. Haris Yasin Limpo pernah menjabat sebagai anggota DPRD Makassar periode 2009 - 2014, Ketua Harian DPD Partai Golkar Makassar, dan pernah sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.
6. Irman Yasin Limpo, yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Sulsel, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Pemprov Sulsel.
7. Selain putra-putri Yasin Limpo, cucu Yasin Limpo pun pernah menjadi legislator, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo adalah mantan anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar, dan saat ini

menjabat sebagai Bupati Kabupaten Gowa Periode 2016-2021 dan 2021-2026.

Dan masih banyak lagi keluarga besar Yasin Limpo yang menduduki jabatan politik/pemerintahan di Sulawesi Selatan. Tujuan dari politik kekerabatan Yasin Limpo ini dibentuk untuk mengamankan jabatan - jabatan politik/pemerintahan maupun nonpolitik/pemerintahan di suatu daerah agar tidak keluar dari lingkaran keluarga, dan agar kekuasaan itu tidak menyebar, tapi terpusat. Adapun dinasti politik Yasin Limpo merupakan dinasti yang diprakarsai oleh Syahrul Yasin Limpo, dinasti ini menjadi berkesan sejak Yasin Limpo yang merupakan Jendral Besar di masa pemerintahan orde baru. Dinasti ini dimulai ketika Syahrul Yasin Limpo memulai karir politiknya sebagai camat Bontonompo di Kabupaten Gowa di tahun 1984, Sekretaris Wilayah Daerah kabupaten Gowa 1991 dan menjadi Bupati Gowa selama 2 periode di tahun 1994 - 2002 serta menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan bersama Muhammad Amin Syam di tahun 1998 hingga 2003, serta menjadi Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 (dua) periode dari tahun 2008 - 2018.

Keluarga Yasin Limpo yang terlibat dalam dinasti poliitk Yasin Limpo khususnya di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan adalah, Syahrul Yasin Limpo yang menjabat sebagai Bupati Gowa selama 2 periode di tahun 1994 - 1999 dan 1999 – 2002, kemudian dilanjutkan oleh Ichsan Yasin Limpo saudara kandung Syahrul Yasin Limpo, dia pun menjabat sebagai Bupati Gowa selama 2 periode di tahun 2005 - 2010 dan 2010 - 2015, dan

akhirnya jabatan tersebut dilanjutkan oleh Keponakan Syahrul Yasin Limpo, atau anak dari Ichsan Yasin Limpo yakni Adnan Purichta yang menjabat sebagai Bupati Gowa untuk periode 2016 - 2021 dan 2021 – 2024. Dari uraian di atas maka dapat dilihat bagaimana Karir politik Syahrul Yasin Limpo sebagai mantan Gubernur Sulawesi Selatan juga merupakan mantan Bupati Gowa telah melakukan estafet kepemimpinan kepada adik kandungnya yang juga sekaligus ayah dari Adnan Purichta, yaitu Ichsan Yasin Limpo.

Cengkeraman kuat dinasti politik Yasin Limpo di Kabupaten Gowa selama 30 tahun (1994 - 2024) merupakan bukti keberhasilan Syahrul Yasin Limpo di dalam membangun kekuatan politiknya selama menjabat sebagai Bupati Gowa, yang mana kemudian kekuatan itu dia gunakan untuk menopang Ichsan Yasin Limpo yang maju sebagai calon Bupati Gowa selanjutnya yang akhirnya berhasil terpilih. Selama masa jabatan itu pula Ichsan Yasin Limpo menanam rasa percaya masyarakat Kabupaten Gowa melalui hasil kinerja positif yang kemudian kepercayaan masyarakat tersebut dipanen oleh anaknya yaitu Adnan Purichta sebagai modal awal untuk maju menjadi calon Bupati Gowa menggantikan ayahnya. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa partai politik pada umumnya lebih tertarik untuk merekrut calon kepala daerah berdasarkan tingkat popularitas seorang figur di wilayah tertentu, atau berdasarkan latar belakang dari nama besar keluarga. Bahkan kemenangan Adnan Purichta pada Pilkada 2020 silam sebagai calon tunggal yang di usung

oleh partai - partai besar seperti partai Golkar, PPP, PAN, Demokrat, PDIP, dan PKS semakin menunjukkan begitu besarnya pengaruh politik yang di wariskan oleh para pendahulunya (Yasin Limpo, Syahrul Yasin Limpo, Ichsan Yasin Limpo) sehingga sebagian besar dari partai politik memberikan kepercayaan kepadanya untuk kembali di calonkan sebagai Bupati Gowa untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya telah terpilih untuk satu periode masa jabatan.

Fenomena dukungan partai politik inipun mengindikasikan adanya eksistensi politik kekerabatan yang sedang berlangsung dan membentuk dinasti politik di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Sebenarnya tidak ada yang salah jika dinasti politik terbentuk secara alamiah, rasional, dan merujuk pada kompetensi. Di negara-negara demokrasi maju pun telah tercatat keluarga yang punya sejarah panjang dalam dunia politik mereka. Namun, yang menjadi soal adalah jika faktor keluarga itulah yang semata-mata dikedepankan sehingga kompetensi personal pun seolah dikesampingkan. Terlebih lagi bila kekuasaan yang dimiliki seseorang karena jabatannya sebagai kepala daerah malah disalahgunakan untuk memperluas jaringan politik kekerabatannya hingga ke berbagai wilayah. Kekuatan politik yang dimiliki keluarga Yasin Limpo sangat memadai dalam menghadapi rival-rivalnya pada kontestasi elektoral di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa. Penguasaan sumber daya yang besar oleh keluarga Yasin Limpo baik dari aspek pemerintahan maupun sosial sangat sistematis. Sehingga kekuatan politik keluarga Yasin Limpo

sangat besar dan sangat kuat dalam mempertahankan politik kekerabatannya. Salah satu cara yang digunakan oleh keluarga Yasin Limpo dalam mempertahankan kekuasaannya adalah dengan menyuruh anggota keluarga untuk ikut dalam kontestasi politik, atau dengan menunjuk anggota keluarga untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan sebagai bagian dari birokrasi.

Di Sulawesi Selatan, kultur kekeluargaan merupakan faktor determinan dalam kontestasi politik di pemilu. Fenomena keluarga politik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota begitu nyata dan meluas. Nama besar keluarga menjadi kekuatan politik yang bisa dikonversi menjadi kekuasaan. Di beberapa daerah di Sulawesi Selatan terlihat pemimpinnya mengikut-sertakan anggota keluarga lainnya dalam dunia politik, tidak hanya sebagai pemimpin daerah tetapi juga sebagai anggota legislatif. Keadaan ini memperkuat potensi untuk melanjutkan kekuasaan menjadi semakin terbuka lebar. Selain itu, terdapat pula faktor keinginan dari masyarakat untuk kembali dipimpin oleh keluarga petahana atau kondisi statusquo dalam masyarakat yang menginginkan daerahnya dijabat kembali oleh keluarga petahana (Jati 2013; Purwaningsih 2015).

Adanya keinginan masyarakat untuk memilih kembali elit-elit politik dari keluarga yang sama dinilai oleh Rasyid (1991) sebagai akibat dari karakteristik masyarakat Sulawesi Selatan yang begitu menghargai hubungan kekerabatan. Kecenderungan masyarakat Sulawesi Selatan untuk memilih figur tertentu karena adanya hubungan kekerabatan

merupakan sesuatu yang wajar, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama. Nilai semacam ini tidak saja mengikat pribadi orang per-orang dalam lingkungan sosialnya, tetapi juga dalam berbagai interaksi politik. Dalam dimensi sosialnya, ikatan kekeluargaan itu dibentuk melalui jaringan perkawinan. Selain itu, struktur kekeluargaan yang dibangun mencakup garis-garis ke atas dan ke samping yang relatif panjang. Dalam dimensi politiknya, suasana kekeluargaan yang terbentuk di masyarakat berakar kuat pada kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan tradisional yang pernah besar di Sulawesi Selatan (Gowa, Bone dan Luwu) dibangun dan dipelihara oleh mereka yang mempunyai hubungan darah satu sama lain.

Kultur kekeluargaan yang mejadi budaya masyarakat di Sulawesi Selatan menjadi salah satu faktor penyebab terbentuknya keluarga politik. Keikut-sertaan anggota keluarga lainnya dalam kancah politik untuk melanjutkan kekuasaan juga didukung oleh sikap masyarakat yang memberikan lampu hijau. Tentu, selain dari sikap masyarakat tersebut, kesempatan ini juga dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para anggota keluarga untuk terlibat di dalam dunia politik. Kultur masyarakat Sulawesi Selatan ini dimanfaatkan oleh keluarga politik termasuk keluarga Yasin Limpo untuk membangun politik kekerabatannya di Sulawesi Selatan.

Politik Kekerabatan Yasin Limpo di Sulawesi Selatan dapat terus bertahan karena kultur keluarga Yasin Limpo yang memang sangat kuat di Sulawesi Selatan. Yasin Limpo sebagai pencetus Politik Kekerabatan Yasin Limpo adalah seorang elit Golkar pada masa orde baru. Sehingga

memiliki berbagai sumber daya yang bisa dia digunakan untuk membangun politik kekerabatan di Sulawesi Selatan. Bahkan pengaruh keluarga Yasin Limpo sampai pada level eselon dua di daerah. Sehingga banyak bupati yang ingin maju dalam kontestasi politik di daerah meminta dukungan kepada keluarga Yasin Limpo, dan politik kekerabatan yang dibangun oleh keluarga Yasin Limpo dapat terlihat sampai saat ini, beberapa orang dari anggota keluarga Yasin Limpo ada yang menjadi kepala daerah, anggota legislatif, dan pejabat di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Masyarakat sebagai pemilih pun tetap menghendaki keluarga Limpo terpilih dalam kontestasi politik yang ada. Kekuatan politik kekerabatan dibangun dengan cara yang sangat rapih, berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya dalam hal ini kabupaten Gowa dapat memberikan dampak positif di beberapa sektor berdasarkan data statistik. Hal ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh keluarga Yasin Limpo untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Disamping kuatnya kultur kekeluargaan Yasin Limpo yang ada di tingkat lokal seperti Kabupaten Gowa, mereka juga di dukung oleh hasil kinerja yang baik dari personal anggota keluarga Yasin Limpo di baik di eksekutif maupun legislatif.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis, memahami dan mengetahui tentang dinasti politik yang

¹¹ Rusnaedy, Zaldy & Titin Purwaningsih. (2015), "Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015". Hal. 12-16

dimiliki oleh keluarga Yasin Limpo. Bagaimana politik kekerabatan yang dibangun oleh mereka mampu bertahan hingga sejauh ini, meskipun di beberapa waktu dan tempat ada juga perwakilan dari keluarga Yasin Limpo yang gagal terpilih, namun pada umumnya berhasil dimenangkan oleh mereka. Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Politik Kekerabatan Yasin Limpo di Sulawesi Selatan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, serta mengingat bahwa luasnya cakupan masalah yang diteliti mengenai **“Politik Kekerabatan Yasin Limpo di Sulawesi Selatan”**, maka penulis membatasi pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara keluarga Yasin Limpo dalam mempertahankan politik kekerabatannya di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana pola jaringan politik yang dibangun oleh keluarga Yasin Limpo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, adapun tujuan dari penelitian ialah :

1. Untuk mengetahui apa saja hal yang membuat keluarga Yasin Limpo masih dapat terus bertahan dan dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Selatan.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis faktor dan strategi yang

digunakan oleh keluarga Yasin Limpo dalam membangun jaringan politiknya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

- a. Untuk memberikan penjelasan secara teoritis dan memperkaya teori dan khasanah dalam ilmu politik khususnya teori keluarga politik atau politik kekerabatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran pada pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik sekaligus sebagai salah satu referensi perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin khususnya Departemen Ilmu Politik.
- c. Penelitian ini bermanfaat dalam memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana program strata satu (S-1) di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

2. Aspek Praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang politik kekerabatan Yasin Limpo di provinsi sulawesi selatan.
- b. Hasil Penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi

rujukan dalam melakukan penelitian yang serupa ditempat lain.

- c. Sebagai bahan rujukan untuk para pemangku kebijakan agar memperhatikan proses demokratisasi ditingkat lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini membahas tentang konsep, pendekatan dan teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yang mana juga diterapkan guna membantu peneliti dalam proses penelitian ini. Bab ini juga membahas mengenai kerangka berpikir serta skema pikir penelitian, maka aspek tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.1. Politik Kekerabatan

Munculnya fenomena politik kekerabatan diwarnai dengan majunya istri, anak ataupun kerabat dari petahana (*incumbent*) baik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif. Dalam perspektif teori elite, majunya kerabat petahana menyebabkan sirkulasi elite hanya terjadi di kalangan keluarga penguasa dan menutup peluang bagi calon-calon alternatif di luar elite penguasa. Politik kekerabatan ini cukup problematik karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua warganegara. Bahkan politik kekerabatan dianggap membajak demokrasi. Untuk mencegah politik kekerabatan, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, pemerintah mengusulkan untuk melarang keluarga kepala daerah (petahana) untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah.

Politik kekerabatan kerap dinilai sebagai sesuatu yang bisa melanggengkan kekuasaan. Politik kekerabatan atau yang lebih dikenal

dengan politik dinasti memang kerap terjadi dan bahkan terjadi disekitar kita. Politik kekerabatan adalah rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/pemerintahan yang tidak di dasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, tapi berdasarkan pertimbangan hubungan kekerabatannya (baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan). Namun meski seperti itu faktanya tidak semua fenomena anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/pemerintahan merupakan hasil dari politik kekerabatan. Walaupun berasal dari keluarga politisi ataupun keluarga yang sudah mempunyai jabatan politik sebelumnya, apabila direkrut melalui mekanisme demokratis dan memenuhi kualifikasi dalam rekrutmen politik, maka hal tersebut bukan merupakan manifestasi dari politik kekerabatan.¹²

Politik kekerabatan menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Dengan menggunakan alat-alat kelengkapan demokrasi seperti partai politik, lembaga, dan institusi negara, serta media massa. Peralatan sistem demokrasi tersebut digunakan bukan untuk menopang sistem demokrasi melainkan memanipulasinya menjadi oligarki. Politik kekerabatan menjadi ruang perebutan kekuasaan dan penimbun kekayaan antara para oligarki. (Harjanto, 2011:138). Terdapat beberapa

¹² Masitah, Dewi. 2018. *Tafsir Politik: Gejala Demokrasi Versus Dinasti pada Pilkada Serentak 2015*. Unair: Cisoc Kajian Rumpun Pendidikan Ilmu Sosial. Vol. 2 No 01. Hal 45-56.

catatan mengenai fenomena politik kekerabatan yaitu, pertama; terdapat keinginan yang cukup kuat dari pertahana untuk mempertahankan kekuasaan dengan membentuk keluarga politik ditingkat lokal. Kedua; kecendrungan pembentukan politik kekerabatan ternyata didukung oleh partai-partai besar di lembaga perwakilan yang berarti juga memperoleh dukungan dari elit politik. Dukungan partai-partai besar pada kandidat dari keluarga pertahana (yang bahkan bukan berasal dari kader partai) menunjukkan masih lemahnya partai politik sebagai instrumen demokrasi, yang lebih mengandalkan pada aspek popularitas kandidat (purwaningsih, 2015:2).¹³

2.2. Faktor-faktor terbentuknya Politik Kekerabatan

a. Patron Klien

Patron klien merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron di suatu pihak dan klien di pihak yang lain. Ketidakeimbangan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. William R. Scott (1931) mengatakan bahwa Patron klien didefinisikan sebagai hubungan antara dua orang yang melibatkan instrumen persahabatan, dimana tingginya status sosial ekonomi digunakan untuk memberikan perlindungan kepada orang yang memiliki status rendah, untuk membalasnya. Dilakukan dengan

¹³ Masitah, Dewi. 2018. *Tafsir Politik: Gejala Demokrasi Versus Dinasti pada Pilkada Serentak 2015*. Unair: Cisoc Kajian Rumpun Pendidikan Ilmu Sosial. Vol. 2 No 01. Hal 45-56.

cara menawarkan dukungan dan bantuan umum, termasuk pelayanan pribadi dan menjadi pelindung. Sedangkan Lande (1997) mendefinisikan relasi patron sebagai hubungan patron klien secara vertikal yaitu aliansi antara dua orang dengan status, kekuasaan, atau sumber daya yang berbeda-beda yang masing-masing merasa memiliki anggota superior secara pribadi disebut pelindung. Anggota yang lebih rendah disebut klien.

Patron klien terjadi karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Disatu sisi, patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status dan pengaruh. Sedangkan disisi lain, klien hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Oleh karena itu, hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan “pertukaran kepentingan”. Hubungan ini akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin.

Pilkada langsung telah membuka ruang bagi patron (logika pertukaran kepentingan) yang lebih dalam lagi, karena kepala daerah terpilih berusaha menggunakan kedudukannya untuk memainkan peranan sebagai pemilih sumber utama. Peranan ini bukanlah satu hal yang sukar untuk dilaksanakan oleh para kepala daerah, karena melalui kedudukannya, para pemimpin politik ini mempunyai banyak peluang untuk menggunakan institusi publik

sebagai domain kekuasannya serta mendistribusikan *public resources* yang berada dibawah kendalinya sebagai alat pertukaran bagi tujuan tertentu. Jaringan sosial adalah hubungan-hubungan interaksi antar individu, dimana pola hubungan-hubungan interaksi dan kaitankaitan para anggotanya sebagai individu yang bebas dengan individu-individu lain sehingga membentuk suatu komunitas sosial.

b. Jaringan Sosial

Jaringan sosial adalah suatu jaringan yang sengaja dibangun oleh aktor politik yaitu kandidat ataupun partai politik yang membentuk sebuah hubungan relasi kekerabatan dan hubungan sosial terhadap pihak yang dianggap bisa memberikan kontribusi positif bagi perolehan dukungan politik yang diusungnya (Pratama & Rheka Adji, 2017: 13). Penggunaannya oleh para aktor politik merujuk pada hubungan yang sengaja dijalin agar mendapatkan suatu keuntungan balas jasa baik berupa materi maupun dukungan terhadap sistem dan ideologi politik yang diusungnya.

Penggunaan strategi jaringan sosial ini dalam dunia politik lebih fokus pada pola-pola pengaruh dan penyebaran pengaruh yang menimbulkan efek nyata. Tujuan dari jaringan sosial ini antara lain yaitu untuk membangun loyalitas pemilih, membentuk stereotip, dan membentuk prasangka. Loyalitas pemilih tercipta ketika rekan politik yang masuk dalam pihak sekutu dalam jaringan sosial dari kandidat

dan partai politik tertentu bisa menggunakan kemampuannya untuk menjaring dan mengarahkan massa agar memberikan dukungannya kepada kandidat dan partai politik tertentu yang berdiri sebagai rekan politiknya.

Pembentukan stereotip oleh rekan politik sekutu dari jaringan sosial dari kandidat dan partai politik tertentu adalah dapat menciptakan keyakinan dari pemilih bahwa kandidat dan partai politik sekutunya itu adalah yang paling positif dari segala hal dan menganggap yang lain negatif. Adanya jaringan sosial yang sengaja dibentuk oleh kandidat atau partai politik ditujukan agar aktor-aktor yang berada dalam jaringan sosial tersebut bisa menciptakan inovasi pendekatan guna meraih simpati massa. Pendekatan pendekatan tersebut antara lain dengan membentuk prasangka terhadap kelompok ataupun kandidat dan partai politik lain yang menjadi pesaing dari rekan sekutu politik dari jaringan sosial tersebut.¹⁴

2.3. Teori Kekkerabatan

Dalam kajian antropologi, pengertian kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan yang dilandasi oleh perkawinan. Menurut pendapat William A. Haviland (1985:73), hubungan dalam satu keluarga biasanya melibatkan ibu, anak yang masih tergantung padanya, serta bapak yang diikat oleh perkawinan atau hubungan darah. Selain itu, ada hubungan

¹⁴ A.S, Kausar. *Sistem Birokrasi Pemerintahan di Daerah dalam bayang-bayang Budaya Patron-Klient*. Bandung: PT Alumni. 2015. Hal. 78 -80

antarkeluarga atau antarkerabat, yang merupakan relasi di luar keluarga inti. Sementara istilah kerabat, mengutip Kamus Antropologi (1985:196), bisa dimaknai sebagai orang sedarah atau dekat sehingga hubungan di antara mereka disebut dengan kekerabatan. Hubungan kekerabatan bisa dibangun dari pihak istri maupun suami. Secara umum, ada 3 jenis bentuk kekerabatan, yakni parental, bilateral, matrilineal, dan patrilineal. Penjelasan mengenai masing-masing dari jenis kekerabatan itu bisa dicermati di bawah ini:

1. Kekerabatan Parental

Kekerabatan parental sering juga dikenal dengan istilah bilateral. Sistem parental berlaku ketika seseorang menjadi keturunan satu pertalian kekeluargaan karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh Ayah dan Ibu. Dikutip dari buku Antropologi Kelompok Kompetensi B (2021: 13-14), kekerabatan parental dapat ditemukan hampir di seluruh suku yang ada di Indonesia. Bagian terkecilnya adalah satu keluarga yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan Anak.

Hasil keturunan dari perkawinan dalam keluarga penganut sistem kekerabatan parental, baik anak perempuan maupun laki-laki, akan memiliki posisi sederajat tanpa ada perbedaan karena sistem kesukuan. Dalam kekerabatan parental, laki-laki ataupun perempuan dapat menikah dengan orang di luar sukunya untuk menjadi penerus dan memberikan keturunan baru.

2. Keekerabatan Patrilineal

Kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan hanya dari satu pihak: bapak. Jadi, anak menghubungkan diri dengan ayahnya, atau berdasar garis keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal juga menghubungkan anak dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral, demikian menukil penjelasan Gungsu Nurmansyah dalam buku Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropolog (2019:97). Baca juga: Contoh Perubahan Sosial di Kehidupan Sehari-hari & Masyarakat Desa Sementara mengutip buku Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia (2016:9) karya Ellyne Dwi Poespasari, dalam sistem kekerabatan patrilineal, laki-laki digambarkan memiliki posisi lebih tinggi daripada perempuan.

Dalam masyarakat dengan kekerabatan patrilineal, hanya pihak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan sebagai bagian dari suku-suku tertentu. Maka itu, ketika sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan sebagai penerus, keluarga tersebut akan mengangkat anak laki-laki sebagai penerus klannya. Saat seorang perempuan menikah dengan laki-laki dari suku patrilineal, ia akan menjadi anggota kerabat dari pihak suami beserta anak-anak yang berasal dari hasil perkawinannya.

3. Keekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem kekerabatan ini, pihak perempuan atau keturunan dari garis ibu memiliki kedudukan lebih tinggi ketimbang laki-laki. Di masyarakat penganut sistem kekerabatan matrilineal, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Oleh karena itu, keturunan dari garis ibu sering kali memiliki kedudukan penting, termasuk dalam pembagian warisan. Selain itu, sistem matrilineal menciptakan hubungan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara para kerabat seketurunan menurut garis ibu. Kembali merujuk buku Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia (2016: 9-10), ketika pihak perempuan dari masyarakat matrilineal melangsungkan pernikahan, pada umumnya akan berlaku perkawinan semenda.

Jadi, laki-laki yang menikah dengan perempuan dari suku matrilineal akan mengikuti pihak istri, tetapi ia tidak masuk dalam kerabat keluarga pihak perempuan. Namun hal ini tidak berlaku bagi anak-anaknya, karena akan menjadi bagian dari kerabat Ibu.¹⁵

Di teori kekerabatan ini peneliti menggunakannya sebagai dasar analisis untuk meneliti di lapangan mengenai terjadinya politik kekerabatan keluarga Yasin Limpo dengan melihat bagaimana sistem kekerabatan yang mereka gunakan itu bisa kuat sehingga eksistensi

¹⁵ Romli, Lili, 2010, Pergeseran Kekuatan Politik Pasca Orde Baru, Dalam; PROGRESIF, Vol. II, No.1 Oktober 02, (Political Science Forum, Jakarta, FISIP VI, 2002). Hal. 30

politik kekerabatan mereka masih bertahan hingga saat ini. Dari kekerabatan ini nantinya akan muncul politik kekerabatan, sesuai analisa James Scott (dalam Rlington & Sally, 2015: 33) tentang patron klien , relasi hubungan kekuatan antar individu, dasarnya adalah hubungan kekerabatan. ¹⁶

2.4. Teori Kekuatan Politik

Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai atau mempertahankan tujuannya, gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan menerapkan nilai-nilai liberalisme. Kekuatan politiklah yang mendukung penulis dalam menjabarkan lebih jauh mengenai Politik Kekerabatan Yasin Limpo. Kekuatan-kekuatan politik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bertitik tolak dari analisis sistem politik (teori struktur-fungsi) yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond (1963) bahwa dalam sistem politik, terdapat struktur-struktur politik atau lembaga-lembaga politik yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu demi berjalannya proses politik. Bagaimanakah proses politik itu dapat berlangsung dengan baik, dapat dipahami jika kita melihatnya dari perspektif teoritis sistem politik suatu negara, yakni dengan cara melakukan pendekatan yang disebut dengan “teori struktural fungsional. ¹⁷

¹⁶ Gaus, F Gerald dan Chandran Kukathas, “*Teori Politik, Bandung*” : Nusa Media, 2013. Hal. 51-52

¹⁷ Ibid. Hal. 55

Teori ini bertitik tolak dari asumsi dasar, bahwa dalam sistem politik terdapat fungsi-fungsi yang harus ada demi kelangsungan hidup sistem politik itu sendiri. Pendekatan teoritis ini memusatkan perhatian pada usaha-usaha menemukan beberapa fungsi politik yang ada dalam sistem politik. Selanjutnya telaah struktur politik apa yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Fungsi-fungsi yang dimaksudkan dalam sistem politik adalah *input* dan fungsi *output*. Studi ini memusatkan perhatian pada fungsi *input* yang terdapat di dalam struktur politik (infrastruktur politik) seperti misalnya partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya, dilihat sebagai kekuatan-kekuatan politik menjadi ukuran dalam sistem politik. Struktur politik pada umumnya terkait erat dengan sistem politik. Dalam konteks ini, sistem politik dalam artian yang luas diibaratkan sebagai sebagai sebuah rumah yang menaungi berbagai lembaga dan menjalankan fungsi-fungsi politik dalam suatu negara.¹⁸

Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun lembaga - lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kekuatan-kekuatan politik berperan sebagai penopang sistem politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan. Kekuatan-kekuatan politik suatu negara berbeda dengan kekuatan politik negara lain, tergantung corak sistem politik yang digunakan. Secara lugas dapat dikatakan bahwa kekuatan politik tersentral di fungsi *input* oleh infrastruktur, maka kekuatan

¹⁸ Ibid. 58-59

politik ini dapat berupa kekuatan formal dan non formal. Kekuatan politik Indonesia merupakan suatu daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga di Indonesia dalam bidang politik. Kekuatan politik terbagi menjadi dua yaitu kekuatan politik *patriarchaal* dan *patrimonial*, yaitu adanya kelompok berkedudukan yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat, di dalam kekuatan politik *patriarchal* menunjukkan bahwa pemerintah dalam suatu daerah merupakan orang yang kuat dalam arti berpengaruh karena berjasa dalam sikap bagi semua warganya.¹⁹

Sedangkan kekuatan *patrimonial* adalah berdasarkan kepemilikan, bahwasannya seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan yang akan menduduki kekuasaan. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan fisik, materi maupun politik. Dalam konteks ini penulis memfokuskan fenomena yang penulis ajukan pada teori kekuatan politik (Moh. Mahmu 1998).²⁰ Menurut Hannah Arendt (dalam , Nasution Buyung, 2002: 17) kekuatan (*strength*) merupakan sifat atau karakter yang di miliki setiap individu. Pada hakikatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain. Oleh karena itu kekuatan politik dapat datang dari pengaruh individu yang sangat kuat, sehingga pengaruh tersebut tampak seperti ingin memperkuat individu yang lainnya.²⁰

Proses kekuatan politik dapat berlangsung dengan baik, dapat dipahami jika kita melihat dari perspektif teoritis system politik suatu negara

¹⁹ Nasution, Buyung, 2002, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1966 –1959, Grafiti, Purtaka. Hal. 17

²⁰ Ibid. Hal. 19

yakni dengan cara melakukan pendekatan yang disebut “teori struktural fungsional”. Teori ini bertitik tolak dari asumsi dasar, bahwa dalam sistem politik terdapat fungsi-fungsi yang harus ada demi kelangsungan kekuatan politik itu sendiri. Fungsi-fungsi yang dimaksudkan dalam sistem politik itu adalah fungsi *input* dan fungsi *output*. Adapun penelitian ini memusatkan perhatian pada fungsi *input* yang terdapat di dalam struktur politik (infrastruktur politik) seperti misalnya Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Birokrasi, ataupun Kelompok-kelompok Dalam Masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu. Teori Kekuatan Politik digunakan oleh peneliti agar dapat mengetahui kekuatan politik dan pola jaringan politik yang dibangun oleh keluarga Yasin Limpo, sehingga menyebabkan keluarga Yasin Limpo terus mampu untuk mempertahankan politik kekerabatannya di Sulawesi Selatan.²¹

Menurut Miriam Budiardjo kekuatan politik adalah yang bisa masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat Individual kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Dan secara kelembagaan disini kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga atau organisasi-organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik. Adapun fungsi dari

²¹ Rusnaedy, Zaldy & Titin Purwaningsih. (2015),”*Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015*” Hal. 20

kekuatan politik yaitu:

- a. Untuk mempengaruhi suatu kebijakan mulai dari proses pembuatan sampai jalannya kebijakan tersebut.
- b. Sebagai keseimbangan kekuatan.
- c. Sebagai Agregator yang mengumpulkan berbagai pihak, atau sistem yang digunakan untuk mendukung tujuan politik, dan sebagai artikulator (alat ucap) kepentingan.²²

Di Indonesia sendiri pada dasarnya banyak aspek potensial tertransformasikannya sesuatu menjadi kekuatan politik sebagaimana yang dikatakan oleh Bachiar Effendy (2001) yakni:

- a. Kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam partai - partai politik & militer.
- b. Sementara yang diartikan dengan kekuatan politik yang nonformal adalah merupakan bagian dari bangunan *civil society* (masyarakat sipil), dalam hal ini dapat dimasukkan : dunia usaha, kelompok profesional, tokoh agama dan masyarakat, kalangan cendekiawan, dan media massa.²³

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan

²² Budiardjo, Miriam. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Hal. 15

²³ Rlington, Sally. *Siri, Darah, dan Kekuasaan Politik (Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan)*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan. 2015. Hal. 33

penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Masda Putri Amelia yang berjudul *Membangun Dinasti Politik melalui Jejaring Kekuasaan pada Walikota Probolinggo* mengemukakan bahwa dinasti politik banyak dibangun di beberapa daerah di Indonesia.²⁴ Dinasti politik merupakan kekuasaan yang dipegang secara turun temurun dalam satu garis keturunan atau kerabat dekat. Hal ini ditandai dengan tersebarnya jejaring kekuasaan melalui trah politik pendahulunya dengan cara penunjukan istri, suami, anak, paman dan semacamnya untuk menduduki pos-pos strategis dalam lembaga politik. Biasanya ini adalah cara agar sanak family tersebut bisa dengan mudah meraih jabatan publik baik sebagai bupati/wakil bupati (eksekutif) maupun sebagai anggota perwakilan rakyat/DPRD. Hal ini dapat menghambat sistem demokrasi karena tidak memberikan peluang bagi masyarakat luas untuk ikut serta dalam proses politik. Dinasti politik di daerah dapat dilihat dari hubungan antara aktor-aktor dalam struktur politik, yang mana terdapat hubungan keluarga diantara mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Masitah Dewi yang berjudul *Tafsir Politik: Gejala Demokrasi Versus Politik Kekerabatan pada Pilkada Serentak 2015*, menjabarkan bahwa politik kekerabatan ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena sudah terjadi mulai jaman orde baru sampai

²⁴ Masda, Putri Amelia yang berjudul „Membangun Dinasti Politik Melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan Pda Walikota Probolinggo“. Jurnal Politik Muda, Vol.4, No.3 Agustus-Desember 2015.

reformasi sekarang.²⁵ Politik kekerabatan ini sudah mengakar ke daerah mulai dari presiden sampai kepala desa. Mereka yang terpilih selalu mengingkari bahwa ini politik kekerabatan tapi pilihan rakyat murni. Benarkah demikian? Apakah benar ini pilihan rakyat murni? Bagaimana sekeluarga menjadi kepercayaan masyarakat secara berbarengan. Hal ini mirip politik kerajaan ataupun dinasti. Kebingungan pemahan makna praktek politik demokrasi yang berwujud Dinasti inilah perlu kita kaji bersama bagaimana makna demokrasi dan politik kekerabatan sesungguhnya secara hermeneutika. Agar masyarakat kita bisa menggunakan rasio dalam memilih nanti dengan benar-benar objektif.

Penelitian yang dilakukan Sutisna Agus yang berjudul *Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah*, sejak terbentuk menjadi provinsi yang mandiri, terpisah dari Jawa Barat, kehidupan politik di Banten ditandai oleh menguatnya gejala dinasti politik atau politik kekerabatan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.²⁶ Pada tingkat provinsi, dominasi *the local strongmen*, Tb. Chasan Sochib dalam kepolitikan Banten sangat menonjol dan berhasil menempatkan anaknya, Ratu Atut Chosiyah pada jabatan gubernur selama hampir dua periode (2006-2011 dan 2011-2014).

²⁵ Masitah, Dewi. 2018. *Tafsir Politik: Gejala Demokrasi Versus Dinasti pada Pilkada Serentak 2015*. Unair: Cisoc Kajian Rumpun Pendidikan Ilmu Sosial. Vol. 2 No 01.

²⁶ Sutisna, Agus. 2017. *Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah*. *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. Vol 2. No 2. Hal 101-120

Penelitian yang dilakukan Desiana, Rina, dan Aninda dalam jurnalnya yang berjudul *“Pelanggengan Dinasti Politik “Samawi” Sebuah Studi Perilaku Pemilih Model Psikologis dalam Pilkada Bantul tahun 2010”* mengemukakan bahwa pada pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010, terdapat calon bupati yaitu Idha Samawi yang merupakan istri dari bupati Bantul periode sebelumnya.²⁷ Pencalonan Idha ditengarai sebagai proses pelanggengan kekuasaan klan “Samawi” di Bantul. Kemenangan Idha dalam pilkada Bantul tidak bisa dilepaskan dari pengaruh keluarga Samawi dalam dirinya.

2.4. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah sebuah penelitian yang meneliti dua variable atau lebih.²⁸ Pada penelitian ini, penulis menggunakan skema berpikir yang menggunakan teori kekerabatan dan teori kekuasaan dalam menganalisis tentang politik kekerabatan yasin Limpo di Sulawesi selatan. Fenomena politik kekerabatan Yasin Limpo yang semakin menguat di era reformasi ini dipengaruhi oleh peluang yang ada, melalui pemilihan kepala daerah secara langsung maupun pemilu dengan sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak, serta dukungan dari partai politik yang sudah memiliki nama besar. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh

²⁷ Desiana, Rina, dan Aninda (2010). *Pelanggengan Politik Dinasti “Samawi”*. Sebuah studi perilaku pemilih model psikologis pada pilkada Bantul 2010. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2), 15–28.

²⁸ A. Murni Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016

keluarga politik Yasin Limpo dengan mengoptimalkan jaringan politiknya di Sulawesi Selatan, sehingga memperoleh dukungan publik yang cukup besar.

Politik kekerabatan Yasin Limpo terus mewarnai dunia politik, khususnya di tingkat provinsi Sulawesi Selatan, beberapa dari keluarga Yasin Limpo sejauh ini masih tetap menduduki suatu jabatan struktural di pemerintahan. Diantaranya adalah Adnan Purichta Ichsan yang menjabat sebagai Bupati Gowa periode 2021-2024, kemudian Irman Yasin Limpo sebagai staf ahli gubernur Sulawesi Selatan, dan Kemal Redindo Syahrul Putra menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan. Melihat fenomena tersebut maka akan sangat menarik untuk meneliti seputar politik kekerabatan yang dibangun oleh keluarga Yasin Limpo di Sulawesi Selatan, dan sejauh mana politik kekerabatan tersebut masih mampu terus bertahan hingga saat ini.

Nur Hidayati dalam jurnalnya yang berjudul *Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia* menjelaskan bahwa Praktik kekuasaan dengan memberi posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan sering disebut dengan dinasti politik. Dinasti politik adalah realitas yang tak terhindarkan dalam demokrasi. Sistem politik dinasti untuk mengakomodasi hubungan yang lebih pribadi tanpa melihat kemampuan, sehingga merusak sistem demokrasi yang ingin kita bangun. Fenomena politik kekerabatan muncul karena demokrasi tidak sehat. Sistem meritokrasi dianggap sangat cocok

dengan iklim politik Indonesia. Selain meningkatkan kualitas, kapasitas dan keterampilan seorang pemimpin, sistem meritokrasi ini juga dapat mengikis adanya sistem dinasti.

2.5. Skema Pikir

